

Risalah Seminar & Lokakarya Kepala BAPPEDA SeKTI I Ambon, Maluku, 26-28 Februari 2008

Malam Pembukaan

Lokasi: Kediaman Gubernur Maluku

Hari/tanggal: Selasa, 26 Februari 2008

Petrarca Karetji (Direktur Eksekutif, SOfEI) : melaporkan mengenai latar belakang dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan

- Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan Forum KTI III yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Kesimpulan dan rekomendasi dari semiloka ini akan diteruskan oleh Kelompok Kerja Forum KTI III yang diketuai oleh Ibu Marwah Daud Ibrahim dan khusus jaringan Kepala Bappeda ini dipimpin oleh Ibu Winarni Monoarfa yang adalah juga Kepala Bappeda provinsi Gorontalo;

Marwah Daud Ibrahim (Ketua Kelompok Kerja Forum KTI III): pidato pembukaan dan latar belakang Forum KTI

- Menginformasikan secara ringkas mengenai Forum KTI dan SOfEI;
- Indonesia butuh menguatkan setiap region dalam rangka menguatkan Indonesia secara keseluruhan – berhubungan dengan stabilitas – dibandingkan dengan Uni Eropa, dengan keragaman internal tetapi sukses bersatu secara ekonomi;
- Perlu mempromosikan rasa kepemilikan masyarakat atas segala segmen pembangunan;
- Salah satu alasan mengembangkan SOfEI adalah dalam usaha dan mendukung harmonisasi dan keseragaman dukungan donor di KTI – beberapa region tidak tersentuh oleh donor dan sebagian lain ada program-program yang tumpang tindih – khusus di wilayah Maluku cukup besar wilayah yang belum tersentuh;
- SOfEI dan Forum KTI mengembangkan keberadaan Pusat Kolaborasi Pembangunan di setiap provinsi, sehingga Makassar tidak terlihat seperti Jakarta untuk KTI dan sebagai tambahan bahwa Pak Fadel bermaksud membangun donor dan pusat data di Bappeda Gorontalo, dan;
- Forum KTI akan membangun Indonesia dan itu bisa diawali dari KTI.

Karel Alberth Ralalahu (Gubernur Provinsi Maluku): pembukaan Semiloka Kepala Bappeda se-KTI I:

- Memandang pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat kerjasama antar provinsi;
- Perlu menemukan keseimbangan yang lebih baik antara Jawa dan luar Jawa, KTI dan KBI, kota dan desa;
- Dukungan penuh baik dari maupun antar Bappeda sangat dibutuhkan;
- Kondisi di Maluku masih dalam kondisi penyembuhan dari kondisi konflik;
- Ada peningkatan dari indikator-indikator sosial tetapi masih terus dilanjutkan dalam usaha peningkatan lebih lanjut;
- Gubernur tertarik mengembangkan pendekatan secara kelompok guna memanfaatkan kelebihan Maluku dalam rumput laut, mutiara, pariwisata, cengkeh, kelapa dan coklat;

- Gubernur akan membangun jalan trans Maluku dan feri-feri laut, yang sudah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan DPR;
- Pemerintah membangun 12 pelabuhan dalam mendukung pembangunan industri perikanan;
- Gubernur mengembangkan Pusat Komunikasi Daerah – guna meningkatkan komunikasi antar distrik dan daerah-daerah terisolasi (membutuhkan satelit);
- Gubernur berkeinginan untuk menarik investmen dari luar dengan cara meningkatkan iklim investasi – isu utama adalah keamanan, baru-baru ini ada perkelahian antara TNI dan polisi yang menahan group tamu asing yang datang ke Ambon, insiden seperti ini harus dihindari, dan;
- Notifikasi kunjungan ke Maluku masih menjadi isu dari pemerintah asing sehingga pemerintah Maluku dan Indonesia perlu menciptakan kesadaran tentang peningkatan keamanan dan stabilitas di provinsi ini.

Fadel Muhammad (Gubernur Provinsi Gorontalo):

Topik I: Perencanaan Berbasis Indeks Pembangunan Manusia – Praktek Cerdas dari Provinsi Gorontalo

- Membicarakan tentang implementasi HDI di Gorontalo dimana HDI berfokus pada pengukuran kemajuan dari pendidikan, kesehatan dan income generation;
- Kegiatan pengukuran HDI sampai tingkat kecamatan dan merupakan kegiatan pertama kali baik di Indonesia maupun di dunia;
- Gubernur memandang bahwa hal tersebut merupakan indikator penting bagi performa Pemda dan Pemprov;
- Semua itu dilakukan atas kerjasama dengan UNDP, Bank Dunia dan SOFEI;
- Program tersebut membantu dalam menargetkan program-program pemerintah guna menjawab area-area lokal yang paling membutuhkan;
- Di Indonesia, kita terlalu sering mengaplikasikan satu rencana nasional bagi seluruh wilayah, tetapi pada kenyataannya setiap bagian dari negara ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda;
- Rencana pembangunan perlu lebih spesifik menjawab kebutuhan lokal;
- Di Gorontalo, sekarang memberikan insentif berdasarkan performa kepada kepala desa, camat yang menunjukkan kemajuan yang baik dengan indikator-indikator adalah produksi pertanian, kesehatan dan pendidikan;
- Insentif juga diberikan pada pelayan masyarakat secara individual sebagai hadiah dari kerja keras dan performa mereka.

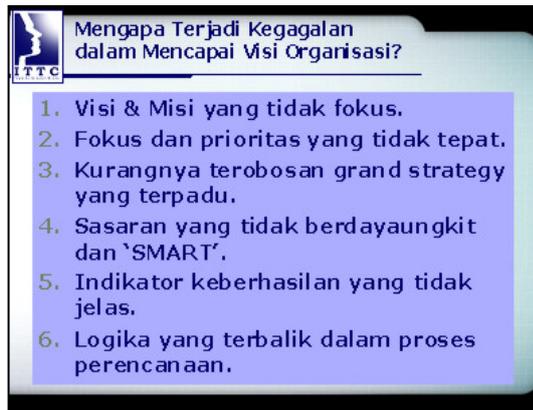
Sesi: Seminar dan Lokakarya
Lokasi: Ruang Rapat Gubernur
Hari/tanggal: Rabu, 27 Februari 2008

Agus Sunaryo (ITTC – International Thinking Training & Consultancy)

Topik I: Membangun Kemampuan dan Kapasitas BAPPEDA dalam mengisi Proses Perencanaan

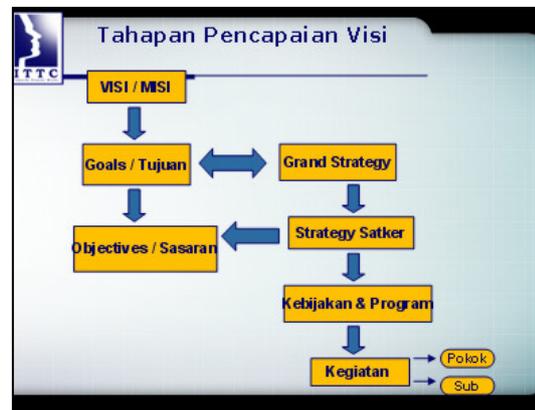
(Bahan Presentasi secara lengkap terpisah)

Catatan Tambahan untuk Presentasi:



- Pendekatan praktis untuk peningkatan kinerja pemerintahan dengan menekankan pada pentingnya proses perencanaan yang efektif;
- Seringkali Visi-Misi terlalu di awang-awang, sulit dicapai secara terukur, Visi-Misi harus sederhana tapi fokus (visi yang fokus membawa hasil yang jelas) contoh: Prov. Gorontalo sbg. "Provinsi Inovasi"
- Grand strategy yang komprehensif memungkinkan fokus bersama oleh semua pihak terkait

- Indikator hanya menunjukkan "output" tanpa melihat "outcome"
- Logika terbalik dalam proses perencanaan



Langkah-langkah praktis

- Susun Visi-Misi secara bersama dan/sehingga dipahami bersama
- Susunan Goals dan Tujuan yang memiliki daya ungkit yang jelas (i) satu sasaran bisa dikeroyok beberapa dinas dan (ii) memastikan bahwa pengalokasian anggaran efektif
- Menghasilkan grand strategy yang terukur (i) *Strategy SATKER* (ii) Kebijakan & Program (iii) Kegiatan yang dibagi dalam pokok dan sub



ITTC

Pemetaan Sasaran :

1. Kita perlu memetakan potensi, peluang dan sasaran strategis yang mampu memberikan daya ungkit besar bagi kemajuan daerah.
2. Sasaran harus jelas dan terukur, karena:
 - Kita tidak dapat mencapai sesuatu yang tidak jelas.
 - Kita tidak dapat memanage sesuatu yang tidak dapat diukur.
3. Sasaran ini harus difokuskan oleh seluruh unit kerja. Dengan demikian akan terjadi penyatuan energi dan sumber daya dari seluruh unit kerja.
4. Sasaran ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Copyright ©2006, ITTC

Praktekkan Konsep "6 S"

Sasaran → Strategi → Sistem → Struktur → Staff → Skill (Sarana dan Prasarana)

Pemetaan Sasaran

- mengacu pada potensi, peluang dan sasaran strategis
- harus jelas dan terukur
- harus menjadi fokus semua unit kerja
- harus diberlakukan secara konsisten dan berkesinambungan

ITTC

Penetapan Indikator:

1. Perlu ditetapkan Indikator Kunci Kinerja (*Key Performance Indicator*) dari setiap sasaran yang perlu dicapai setiap unit kerja.
2. Dengan demikian kita dapat melakukan pengukuran kinerja (*performance measurement*) terhadap implementasi program dan kegiatan di setiap unit kerja.
3. Hasilnya, kita dapat melakukan perencanaan dan perbaikan yang lebih efektif.
4. Hal ini dapat menjadi basis dari diberikannya tunjangan kinerja dengan parameter yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja.

Copyright ©2006, ITTC

ITTC

Penetapan Fokus dan Prioritas:

1. Karena sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, kita harus menetapkan fokus dan prioritas secara tepat.
2. Fokus bukan kepada output, tetapi harus kepada outcome, dan perlu konsistensi yang amat tinggi!
3. Tujuan dari menyusun anggaran bukan untuk memutuskan berapa banyak setiap kegiatan akan didanai, tetapi untuk memutuskan bidang mana yang harus *didanai sepenuhnya* dan bidang mana yang harus tidak mendapat dana sama sekali.
4. Daftar kegiatan yang 'harus dihentikan' lebih penting ketimbang daftar yang 'harus dilakukan'.
5. Kegagalan menetapkan fokus dan prioritas yang tepat akan berakibat kita membiayai kegagalan!

Copyright ©2006, ITTC

Strategy Alignment

Penetapan Indikator (contoh: Kab. HALUT) cari dan tetapkan *key performance indicator* dimana per indikator ada target dan tentukan performance measurements

Penetapan Fokus dan Prioritas

- Menyadari keterbatasan sumber daya sehingga fokus dan prioritas harus tepat
- Fokus bukan kepada output tetapi outcome berdaya ungkit tinggi memanfaatkan konsistensi



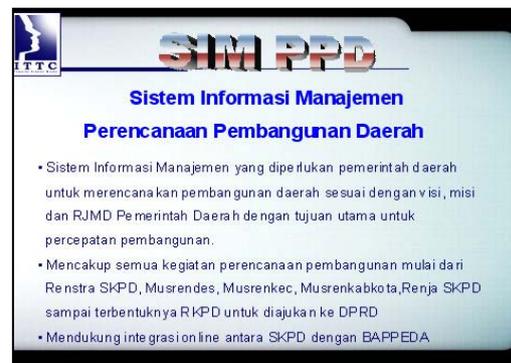
Strategic Breakthrough:

- menciptakan terobosan strategis
- memetakan sasaran yang jelas dan terukur
- membangun grand strategy yang inovatif

Pentingnya Mind Setting:

- mengatasi pola pikir yang menghambat
- memetakan mindset organisasi
- mensinergikan cara berpikir dan bekerja

Pengembangan SIM PPD: Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah



Percepatan Pembangunan: Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Kesimpulan dan Tanggapan:

1. *Pengalaman di Gorontalo* (Fadel Muhammad):

- Pada kenyataannya memang lebih mudah mendapatkan anggaran pembangunan fisik daripada untuk meningkatkan SDM dengan dana 6-10 milyar untuk training yang dilakukan oleh pakar. Dalam hal ini peran pemimpin menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran dan memperoleh alokasi anggaran. Pada awalnya para pejabat merasakan bahwa pengembangan SDM hanya membuang waktu dan anggaran selama ini, pelatihan yg dijalankan juga sangat "in the box" - tidak membantu orang untuk berinovasi. Soal konsistensi dan komitmen pada proses pengembangan menjadi poin yang penting juga dalam peningkatan kapasitas SDM ini.
- Gaji pegawai negeri di Indonesia terlalu kecil, terutama untuk camat dan lurah, sementara tuntutan dan desakan untuk melaksanakan program-program terlalu banyak. Perubahan sulit untuk dilakukan tetapi khusus untuk Gorontalo, perubahan dengan sistem memberikan insentif. Hal ini juga mengubah pola "jalur basah/jalur kering". Awalnya hal ini disebut dengan melanggar peraturan tetapi sekarang dimungkinkan dengan penyusunan tunjangan kinerja daerah.

2. Tanggapan umum:

- digabungkan antara indikator pencapaian sasaran dengan indikator kinerja kegiatan (sebagai bagian dari penetapan sasaran);
- penguatan peran BAPPEDA sampai ke tingkat bawah (tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten), dan;
- Kata kunci "*Koordinasi*" (i) sampai pada saat ini dalam paradigma baru adalah koordinasi yang seharusnya saling memberi dan saling mengingatkan, misalnya antara Bappeda dan BPS, dan (ii) prasyarat terhadap proses yang berjalan harus ada keterbukaan dan apa yang bisa diperoleh.

Sesi: Seminar dan Lokakarya
Lokasi: Ruang Rapat Gubernur
Hari/tanggal: Rabu, 27 Februari 2008

Hermen Malik, PhD (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal)

Topik II: Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk Wilayah Kelautan
(Bahan Presentasi secara lengkap terpisah)

Catatan Tambahan untuk Presentasi:

4 Pilar Strategi untuk mengatasi permasalahan Daerah Tertinggal:

1. meningkatkan kemandirian
 - Strategi Umum (Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
 - Khusus (kontinental dan kepulauan)
2. optimalkan potensi wilayah (infrastruktur)
3. Integrasi ekonomi
 - Makro & Mikro
 - Khusus (Kontinental, Kepulauan, Terisolir dan Wilayah Perbatasan)
4. mengatasi keterisolasian

**Strategi Dasar Pembangunan Daerah Tertinggal
(4 Pilar Strategi):**

Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui: (1) penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah, (2) pemanfaatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pembangunan kawasan produksi;

Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik 'keterisolasian', dilakukan melalui: (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

- Masalahnya adalah apakah Alat koordinasi apakah sudah memadai antara penekanan sektoral dan wilayah?
- Belum terjadi percepatan di wilayah kelautan
- masih sangat rentan (lingkungan)

Saran dan Tanggapan:

1. Pengalaman di Sulawesi Selatan: banyak daerah masih dapat bergeser antara miskin dan tidak miskin. Penekanan dilakukan pada bidang pertanian dengan salah satu solusi dikembangkan adalah melalui PERDA pengelolaan daerah pesisir (misalnya dengan rumput laut).
2. Desentralisasi diharapkan mampu mengatur kewenangan dan uang supaya (i) di tingkat pusat tidak kelebihan uang tetapi kekurangan kewenangan, dan sebaliknya (ii) di daerah kekurangan uang tetapi kelebihan kewenangan.

3. Sinkronisasi dan sinergitas antara program, anggaran, strategi dan rekomendasi dalam menetapkan target dan sasaran yang jelas, fokus, terukur dan terarah (*community based development focus*).
Misalnya untuk KTI: apakah kita bisa tetapkan target yang lebih jelas karena sekarang sasaran ada tetapi selama ini belum ada angka yang jelas.
4. Potensi dan kekuatan tawar-menawar yang ada, KTI harus lebih berperan dalam mengisi pembangunan nasional misalnya dari sisi daerah tertinggal kelautan. 4 dari 7 provinsi kelautan ada di KTI dan dari konteks pendekatan pembangunan wilayah di bagi 4 yaitu (i) terrestrial; (ii) terresterial akuatik; (iii) akuatik-terresterian, dan (iv) akuatik. Program yang dikembangkan lebih terpilah dengan pendekatan wilayah.
5. Tanggapan dari MENNEG-PDT: dari awalan yang koordinatif, sekarang sudah dapat melakukan intervensi strategis
 - Pendekatan masih berbasis wilayah: tidak semata-mata mengukur masalah manusia tetapi juga wilayah untuk dianggap/dikategorisasikan sebagai wilayah tertinggal
 - Kendala yang ada adalah data yang sangat membantu dalam menetapkan target yang jelas dan realistis. Data yang ada bersifat spasial dan kuantitas bukan kualitas sehingga sulit mengukur capaian yang sebenarnya.
 - Indikator yang digunakan masih belum tepat bagi kebutuhan PDT
6. Tanggapan dari BAPPENAS:
 - Pendekatan perwilayahan dalam perencanaan sebelumnya terdapat pendekatan sektoral maupun regional. Memasuki era reformasi terdapat perubahan mendasar dimana dokumen perencanaan mulai berbasiskan isu - penjabaran agenda pimpinan terpilih
 - (i) Beberapa tahun pertama RPJM diangkat prioritas yang bersifat kewilayahan, (ii) sejak tahun 2007, (iii) Perlu ada lembaga yang menjaga prinsip pengarusutamaan dengan perencanaan di daerah, (iv) Bappenas mengawal pada perencanaan strategis

Sesi: Seminar dan Lokakarya
Lokasi: Ruang Rapat Gubernur
Hari/tanggal: Rabu, 27 Februari 2008

DR. Ir.Himawan Hariyoga (Direktur Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Negara PPN/Bappenas)

Topik IV: Kemitraan Daerah dan Pusat dalam Membangun Perencanaan yang Efektif
(Bahan Presentasi secara lengkap terpisah)

Catatan Tambahan untuk Presentasi:

Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional

- Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI, dalam rangka pencapaian sasaran nasional, yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah.
- Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang dirikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- Pencapaian tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota → Perlu direncanakan dalam kerangka jangka panjang, menengah & pendek.

Sharing dan solution seeking bersama dalam kemitraan pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional sudah ada dan perencanaan daerah merupakan bagian dari perencanaan nasional. Fokus utama pada penyiapan dokumen-dokumen perencanaan. Kualitas perencanaan sendiri perlu menjadi perhatian, agar tidak terjebak dalam rutinitas. Poinnya adalah bagaimana meningkatkan efektifitas perencanaan.

Catatan tambahan selama presentasi

- ada sejumlah PP, misalnya PP 8/2008, yang seharusnya dikeluarkan sejak lama, terminologi RKPD bisa membingungkan daerah;
- tahun anggaran pusat dan daerah waktunya sama, menyimpan persoalan sinkronisasi antara rencana pusat dan daerah;
contoh: info transfer pusat ke daerah terlambat dan penyusunan APBD terhambat;
- Musrenbang masih bersifat ritual, ketimbang pada kualitas Musrenbang;
- Depdagri masih menggodok SE pelaksanaan musrenbang. Langkah ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas Musrenbang;
- banyak SKPD belum mempunyai Renstra, akibatnya menghambat pembahasan KUA dan PPAS, sehingga APBD terlambat di-submit.
- *Program Insentif:* sedang digodog pemantapan sistem insentif yang adil (*reward and punishment*) dan diperlukan masukan dari Forum KTI. Pilot pelaksanaan untuk program ini kemungkinan di Papua dan Gorontalo, karena telah melaksanakan program yang terkait dengan persiapan program insentif.

FORUM KTI:

- Forum KTI perlu mengusulkan agenda untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kemitraan antara bappenas dan bappeda;

- Karena kemampuan keuangan pemerintah terbatas (kemampuan APBD hanya sekitar 12% - 15%) dalam membiayai total kebutuhan investasi, perlu melibatkan partisipasi swasta, Forum Kepala Bappeda se-KTI bisa memberikan gagasan di bidang ini;
- Forum ini dapat bekerjasama untuk mengisi kebutuhan perencanaan bersama (nasional dan daerah) dengan mengembangkan kerjasama untuk merumuskan rancangan makro ekonomi daerah;
- Forum ini dapat memanfaatkan lembaga-lembaga luar untuk bekerjasama.

Kaitan dengan Bank Indonesia (BI):

- Ada banyak yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk mengendalikan inflasi tetapi karena selama ini merupakan tanggungjawab BI maka Pemda tidak mengambil dukungan yang cukup. Bappenas akan lakukan analisa bersama dengan BI, apakah memungkinkan di daerah Pemda melakukan hal yang sama dengan BI. di daerah daft

Saran dan Tanggapan:

BAPPENAS:

1. Peluang pendanaan untuk KTI, terutama dalam konteks regional dan dalam pertimbangan karakteristik khusus dan keragaman, bisa disiasati. Dana K/L yang ada dioptimalkan karena jumlahnya sangat besar. Daerah dengan kriteria khusus (misalnya karakteristik daerah yang khusus, kepulauan, perbatasan, daerah tertinggal) seharusnya memperoleh prioritas DAK. Persoalannya adalah dokumen perencanaan yang tidak terstruktur, baik dalam sektoral dan wilayah, tetapi terserak, maka ada kesulitan untuk sinkronisasi dan mengkaitkan implikasinya ke pendanaan.
2. Analisa yang mendalam dari input-output inter-regional (misalnya antar provinsi) merupakan salah satu sumber yang bisa digunakan. Hasilnya bisa dikelompokkan antar regional dengan melihat antara lain keterkaitan dan dukungan infrastruktur. Setelah itu dihubungkan dengan dukungan kebijakan dari pusat (untuk back up) dan juga dukungan dari dunia usaha atau mendatangkan investasi.
3. Banyak proses evaluasi anggaran yang tidak melibatkan Bappenas melainkan Depdagri, sementara berbagai proses evaluasi seharusnya menjadi peran Bappenas. Legitimasi perencanaan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi yang kuat dengan Bappenas sehingga dapat menghindari intervensi Depdagri. Pada saat kegiatan akan dilakukan Bappeda diikut sertakan, saat kegiatan sudah diplotkan, BAPPEDA tidak lagi dilibatkan.
4. Bappenas punya peran penting untuk menentukan dan mengarahkan sektor. Perlu pelibatan daerah dalam penyusunan DIPA/DIPDA supaya tidak lepas dari pantauan daerah. Kenyataan sekarang
 - tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - hanya mewakili kepentingan sentral;
 - Bappeda sulit melaporkan dan mengevaluasi proses pembangunan di daerah, dan;
 - banyak UPT pusat di daerah yang tidak ketahuan peran dan kegiatannya.

BAPPEDA:

1. Pengembangan jejaring multistakeholder sudah diwujudkan dalam berbagai proses penyusunan RPJP/RPJM. Hal ini perlu ditingkatkan karena proses-proses ini memungkinkan proses peningkatan kapasitas juga.

2. Rakorbang sektoral sebaiknya dilakukan sebelum Musrebangnas supaya lebih sinkron dan efektif.
3. Fungsi atau kewenangan Provinsi mungkin perlu diperjelas. Misalnya sejauh mana peran provinsi dapat difungsikan untuk mengkoordinasikan Balai-balai dan UPT-UPT agar dibawah koordinasi Bappeda Provinsi.
4. Diharapkan Bappeda dilihat sebagai mitra Bappenas untuk melakukan pengukuran kinerja lalu ditanggapi oleh Perguruan Tinggi. Saat ini banyak peran evaluasi justru diambil oleh pihak-pihak diluar Bappeda di daerah dan Bappenas secara nasional.
5. Pengalaman di Gorontalo: KTI sudah dapat mengembangkan database HDI yang berfungsi untuk membantu setiap daerah untuk mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif. Program Analisa Pengeluaran Publik yang dilaksanakan juga berkolaborasi dengan database HDI memaksimalkan perencanaan pembangunan tersebut. Program insentif sebagai hasil lanjutan dari analisis pengeluaran publik menjadi salah satu wujud apresiasi terhadap kinerja daerah.

Forum KTI:

1. Forum harus dapat melahirkan pemikiran dan terobosan untuk menghasilkan kepuasan hasil bagi pembangunan KTI melalui harmonisasi pembangunan. Sekarang ini pembangunan terus ada tetapi tidak dirawat.
2. Forum menjembatani diskursus daerah dan pusat dalam rangka mendukung kemitraan BAPPEDA dalam perencanaan agar semakin efektif.
3. Forum Kepala Bappeda se-KTI digagas sebagai mitra bagi pemerintah Nasional karena dilihat kemitraan pusat dan daerah.
4. Kualitas sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan diharapkan melalui forum ini bisa mendukung (i) proses analisis kondisi KTI secara makro, dan (ii) analisis kondisi daerah di KTI secara mikro.

Lain-Lain

1. Kualitas perencanaan di desa justru sangat rendah meskipun hal ini menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan pada cakupan yang lebih tinggi/luas sehingga perlu hal ini dijalankan per provinsi secara terpadu dan diintegrasikan secara wilayah KTI.
2. Data pada saat ini masih dari perspektif pusat memandang daerah, tidak dari daerah masing-masing.

Tanggapan Umum Bappenas:

1. Dikotomi KTI-KBI saat ini sudah tidak ada lagi. Mendikotomi KTI-KBI hanya pada tataran analisis perencanaan perencanaan jangka menengah dan panjang yang masih mengangkat ketimpangan antar wilayah. Kondisi sekarang yang dilihat adalah sebaran kantong ketertinggalan tidak hanya di KTI tetapi di berbagai wilayah. Forum KTI tetap relevan dalam kerangka ini.
2. Decentralization Support Facility (DSF) – Jakarta
 - Merupakan Institusi/Forum dimana beberapa lembaga internasional yang perhatian terhadap desentralisasi menyusun agenda bersama untuk mengarahkan dukungan dari lembaga luar negeri;

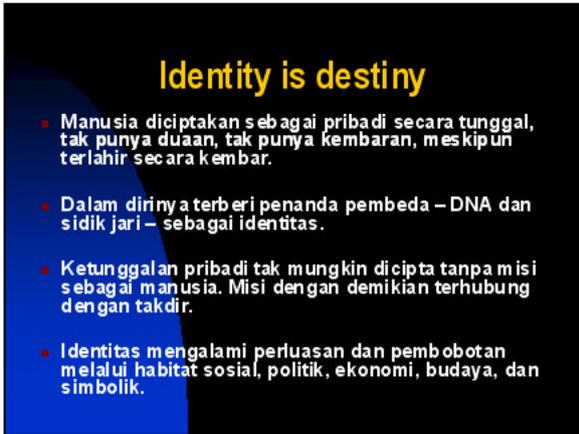
- Fungsi utamanya adalah memperkuat kapasitas daerah/kota untuk menjalankan fungsi-fungsinya, payung hukumnya baru ditandatangani bulan November 2007;
 - Dana yang dikumpulkan disalurkan bagi kegiatan yang mendukung penguatan proses desentralisasi. Setelah DSF ada juga dana-dana multidonor seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Secara keseluruhan dana ini digunakan untuk mendukung proses desentralisasi agar berjalan secara efektif;
 - Struktur DSF ada Steering Committee dan Management Committee yang saat ini sedang menyusun program prioritas, dan;
 - Melalui tatanan ini, kegiatan mendukung DSF akan lebih terkoordinasi. Sebagai contoh seperti yang dilaksanakan SOfEI yang sedang direview kembali untuk dipikirkan tindaklanjut kedepan.
3. Forum Kepala Bappeda se-KTI
 - Perlu menyusun *action plan* yang lebih jelas untuk disampaikan pada rapat DSF;
 - Bisa menyampaikan ke tingkat Bappenas masalah dan kendala (misal: renumerasi yang tidak/belum imbang) yang selama ini terjadi di tingkat daerah, sehingga memungkinkan Bappenas menyampaikan ke tingkat yang lain, dan;
 - Mematangkan usulan penguatan data daerah terutama dari sisi operasional.
 4. Dilema posisi Bappeda/Bappenas, tidak jauh beda kondisi yang dihadapi, semua itu tergantung peran dan kedekatan dengan Presiden/Gubernur.
 5. Musrenbang akan dilaksanakan setelah Rakorbang Sektoral sehingga sebaiknya I/O dapat dikembangkan secepatnya.
 6. Ada program bersama dengan UNDP untuk menguatkan peran provinsi terutama dalam konteks sebagai wakil pusat di daerah (provincial government support program).
 7. selama belum ada instrumen baku, Perguruan Tinggi diminta berperan secara independen agar memberikan masukan berbeda sebagai pelajaran untuk mengembangkan instrumen.
 8. UPT - masih sah apabila melaksanakan urusan pusat.

Sesi: Seminar dan Lokakarya
Lokasi: Ruang Rapat Gubernur
Hari/tanggal: Rabu, 27 Februari 2008

Alwi Rahman, MSi (Universitas Hasanuddin)

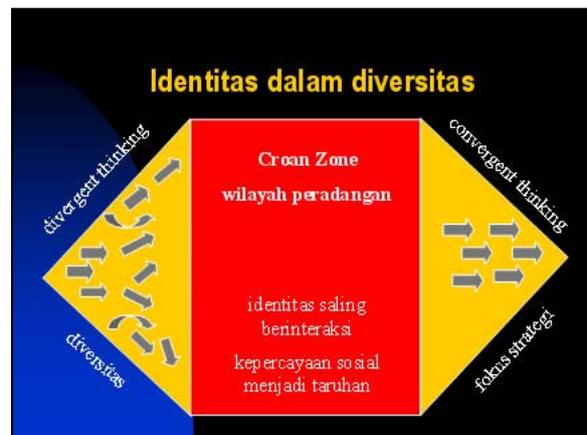
Topik V: Kepercayaan Sosial dalam Berkomunikasi
 (Bahan Presentasi secara lengkap terpisah)

Catatan Tambahan untuk Presentasi:



Identity is destiny

- Manusia diciptakan sebagai pribadi secara tunggal, tak punya duaan, tak punya kembaran, meskipun terlahir secara kembar.
- Dalam dirinya terberi penanda pembeda – DNA dan sidik jari – sebagai identitas.
- Ketunggalan pribadi tak mungkin dicipta tanpa misi sebagai manusia. Misi dengan demikian terhubung dengan takdir.
- Identitas mengalami perluasan dan pembobotan melalui habitat sosial, politik, ekonomi, budaya, dan simbolik.



Identitas Sebagai Takdir

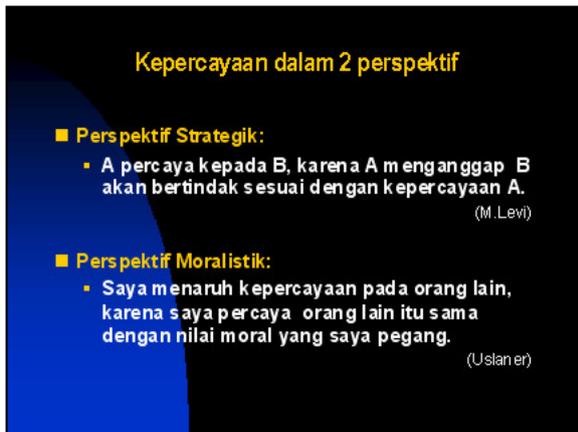
- misi pun berhubungan dengan takdir;
- identitas mengalami perluasan dalam bobotnya karena berbagai "habitat"

Kendala besar di Indonesia karena keterbatasan sejarah budaya dan komunikasi yang berkembang terlalu populer – tidak etno – spesifik. Diversitas menyimpan kekuatan maupun resiko

Identitas Dalam Diversitas

- menghasilkan divergent thinking (pemikiran yang berpencar)
- ada pemikiran yang seragam atau searah
- ada pemikiran yang berlawanan arah

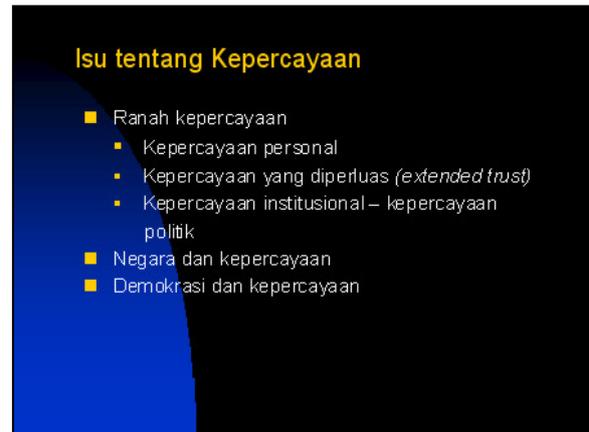
Upaya perlu dilakukan dalam mencapai kondisi pemikiran yang convergent (fokus strategi). Terdapat wilayah antara yang disebut "croan zone" dimana pemikiran bersama "meradang". Pada saat ini kita melewati masa dimana berbagai identitas saling berinteraksi dan dipertaruhkan kepercayaan sosial bersama.



Trust/Kepercayaan dalam 2 perspektif:

1. perspektif strategik
2. perspektif moralistik/institusi

Institusi demokratis dituju sebagai fasilitator kepercayaan. Kepercayaan dianggap sebagai fungsi dari kinerja institusi.



Isu Kepercayaan/Trust:

- Kepercayaan tingkat pribadi: berdasarkan pengalaman dan mengandalkan keakraban
- Extended trust
- Institutional trust: yang terkait erat dengan pekerjaan BAPPEDA misalnya dan lembaga negara

Saran dan Tanggapan:

1. Berbagi pengalaman: dilakukan baseline survey dengan 1 sasaran PTD (*Peace Through Development*) dan 1 non sasaran PTD. Hasilnya sasaran PTD hanya 20% mengetahui mengenai MUSRENBANG sedangkan di non sasaran PTD bahkan hanya 11% mengetahui mengenai MUSRENBANG. Sangat mengkuatirkan betapa sedikit jumlah masyarakat yang mengikuti/mengetahui proses MUSRENBANG.
2. Kepercayaan hanya ada bila ada kompetensi, kepercayaan bisa runtuh karena karakter yang rendah. Jadi kepercayaan harus menggabungkan kompetensi dan karakter. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dari individu menjadi sosial (antar kelompok).
3. Pengalaman di Ambon: juga hampir runtuh saat pasca reformasi dan timbul raja-raja kecil. *Trust Building* di Maluku pada saat itu dilakukan
 - melalui penanggulangan pengungsi, pada saat Bp. Sarundayang menjadi Gubernur, tidak dapat serta-merta menerapkan program pemerintah nasional karena (i) ada pengungsi yg ingin pulang & diterima lingkungannya, (ii) pengungsi yg ingin pulang tapi belum mau menerima lingkungannya dan (iii) kelompok pengungsi pasrah;
 - Masalah lain timbul yaitu (i) insubordinasi dan (ii) raja-raja kecil baru.
4. Tanggapan:
 - "*Blossoms in the Dust*": selalu didalam masyarakat ada pucuk yang dapat mekar dalam kondisi seburuk apapun. Dulu harus cari orang/guru yang kompeten untuk belajar, sekarang tidak lagi sehingga karisma guru runtuh dan hal ini mempengaruhi tatanan/hubungan sosial. Karakter memang penting tapi lebih penting mengembangkan kembali kemampuan berpikir konstitutif. Kenyataan sekarang,

konstitusi atas kertas namun tidak dipercaya/dijalankan. Pemuda kita masih menjadi penghafal, bukan pemikir. Pengetahuan yang masuk tanpa konteks dan narasi "memenggal" kepala budaya para individu (jangan tinggalkan/tanggalkan pengalaman).

- Dalam era otonomi daerah harus disadari bahwa Bappeda adalah pejabat publik, bukan pejabat negara. Penting untuk melakukan dan menentukan pendekatan yang tepat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan di Gorontalo (i) inovasi (ii) team work (iii) kesejahteraan masyarakat (iv) kepercayaan masyarakat dan (v) cepat. Masalah sekarang adalah pembuktian dan komunikasi mekanisme evaluasi untuk mendorong komunikasi.
- Proses perencanaan masih dirasakan kurang memiliki "sense" untuk melihat isu kemiskinan dan menanganinya melalui perencanaan yang lebih baik. Program *staff exchange* dapat mendukung pengembangan "sense" permasalahan yang dihadapi di daerah dan perlu penanganan khusus untuk menghindari ekses-ekses terhadap rentannya "trust" antara pusat dan daerah.

=====